

PENGARUH KONEKSI POLITIK DEWAN DIREKSI DAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN KEPEMILIKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMILIHAN AUDITOR EKSTERNAL

Gita Rahmawati¹; Dwi Winarni²; Sri Wahyuni³; Edi Joko Setyadi⁴

Universitas Muhammadiyah Purwokerto^{1,2,3,4}

Email : gitarhmawati01@gmail.com¹; dwiwinarni@ump.ac.id²;
yuni_7067@yahoo.co.id³; ej_setyadi@yahoo.co.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh koneksi politik dewan direksi dan komisaris, koneksi politik pemegang saham utama, serta kepemilikan pemerintah terhadap pemilihan auditor Big Four pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari 103 perusahaan (309 observasi perusahaan-tahun) yang dipilih melalui purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi logistik biner dan diuji kembali dengan regresi probit sebagai robustness test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik dewan direksi dan komisaris berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor Big Four, sedangkan kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif. Sebaliknya, koneksi politik pemegang saham utama tidak berpengaruh signifikan. Variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif, sedangkan leverage berpengaruh negatif pada tingkat signifikansi 10%. Hasil robustness test mengonfirmasi konsistensi temuan, sehingga menunjukkan bahwa sumber koneksi politik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih auditor Big Four.

Kata Kunci : Koneksi Politik; Auditor Big Four; Kepemilikan Pemerintah; Sektor Keuangan; Pemilihan Auditor

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of political connections of the board of directors and commissioners, political connections of major shareholders, and government ownership on the tendency of companies to choose Big Four auditors in financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2022–2024. The study applies a quantitative approach using secondary data covering 103 companies or 309 company-year observations, determined through a purposive sampling technique. Hypothesis testing was conducted using binary logistic regression, while probit regression was used as a robustness test to verify the consistency of the results. The results show that political connections held by the board of directors and commissioners increase the probability of companies choosing Big Four auditors, while government ownership actually decreases this probability. On the other hand, political connections of major shareholders were not proven to significantly influence auditor selection decisions. The analysis also shows that company size and profitability have a positive effect on the selection of Big Four auditors, while leverage has a negative effect at the 10% significance level. The consistency of these findings is also supported by the results of the robustness test, which indicates that the source of political connections is one of the factors influencing companies' decisions in selecting external auditors.

Keywords : Political Connections; Big Four Auditors; Government Ownership; Financial Sector; Auditor Selection

PENDAHULUAN

Pemilihan auditor eksternal merupakan langkah krusial bagi korporasi karena berdampak langsung pada validitas pelaporan keuangan serta sentimen kepercayaan para penanam modal maupun pihak berkepentingan lainnya (Salehi, 2020). Melalui proses evaluasi yang objektif, pihak auditor menyajikan jaminan bahwa kompilasi laporan keuangan telah disajikan secara objektif, sehingga output informasinya dapat diandalkan sebagai basis penentu kebijakan ekonomi (Sibuea & Arfianti, 2021). Ketersediaan informasi akuntansi yang berkualitas juga menjadi elemen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Winarni & Akbar, 2020).

Dalam berbagai penelitian, kualitas auditor umumnya diukur melalui reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), di mana auditor Big Four dipandang mempunyai independensi, kompetensi, sumber daya, serta kualitas audit yang lebih unggul dibandingkan dengan auditor non-Big Four (Tantawy & Moussa, 2023). Selain meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, audit eksternal juga bagian penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan perusahaan (Paramitha & Setyadi, 2022). Atas dasar itu, penunjukan KAP eksternal berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang efektif untuk mendongkrak reputasi dan keandalan pelaporan keuangan korporasi.

Urgensi mengenai penunjukan pihak pemeriksa ini kian menguat pada entitas yang bergerak di bidang keuangan. Pasalnya, industri ini beroperasi di bawah payung hukum yang sangat ketat dan memiliki ketergantungan yang amat tinggi terhadap stabilitas kepercayaan masyarakat dibandingkan rumpun bisnis lainnya (Alhadab et al., 2021). Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan berkualitas sehingga mampu menyediakan informasi andal bagi para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja maupun akuntabilitas perusahaan (Lutfiani et al., 2021). Sebagai bentuk penguatan kualitas audit di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Regulasi tersebut mewajibkan setiap lembaga jasa keuangan menggunakan auditor independen untuk mengaudit laporannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Distribusi penggunaan auditor Big Four dan non-Big Four disajikan pada Gambar 1 (lihat Gambar 1). Berdasarkan Gambar 1, tercatat ada 109 sampel amatan (setara 35,28%) dari korporasi finansial yang memercayakan auditnya pada jaringan Big Four, sementara 200 amatan sisanya (mencapai 64,72%) cenderung menggunakan KAP domestik non-Big Four sepanjang kurun waktu 2022–2024. Fenomena ini memperlihatkan bahwa adopsi terhadap KAP Big Four pada institusi keuangan di tanah air tergolong minim, walaupun industri ini dikepeng oleh

aturan yang kaku serta ekspektasi keterbukaan yang tinggi. Realitas empiris ini memberikan sinyal bahwa preferensi entitas dalam menetapkan pihak pengaudit eksternal tidak semata-mata didorong oleh aspek mutu pemeriksaan makro saja, melainkan turut diintervensi oleh atribut internal spesifik yang melekat pada masing-masing korporasi.

Salah satu aspek yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam pemilihan auditor eksternal adalah koneksi politik (*political connection*). Dalam beberapa tahun terakhir, isu koneksi politik semakin mendapat perhatian karena dinilai dapat memengaruhi berbagai keputusan strategis perusahaan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola serta kualitas pelaporan keuangan (Preuss & Konigsgruber, 2021). Perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik apabila anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham utamanya mempunyai hubungan dengan pejabat pemerintah, anggota legislatif, militer, partai politik, atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan politisi. Keberadaan koneksi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai kebijakan perusahaan, termasuk keputusan dalam menentukan auditor eksternal yang akan digunakan. (Faccio, 2006).

Fenomena koneksi politik masih banyak dijumpai pada perusahaan di Indonesia. Keterlibatan individu yang memiliki latar belakang politik dalam jajaran direksi, dewan komisaris, maupun sebagai pemegang saham utama menunjukkan bahwa hubungan antara dunia usaha dan ranah politik masih cukup kuat (Sudrajat et al., 2023). Selain itu, penunjukan tokoh politik sebagai komisaris pada berbagai perusahaan, termasuk badan usaha milik negara, juga terus menjadi perhatian publik (Kompas.com, 2024). Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa koneksi politik masih menjadi salah satu karakteristik perusahaan yang berpotensi memengaruhi berbagai keputusan strategis, termasuk keputusan dalam menentukan auditor eksternal (Harymawan, 2020).

Keberadaan koneksi politik dinilai dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi bisnis, seperti kemudahan penetrasi ke sumber permodalan, kelonggaran pemenuhan kewajiban pajak, perluasan pangsa pasar, hingga besarnya peluang mengamankan proyek strategis dari pemerintah (Kharis & Nugrahanti, 2022). Namun demikian, beberapa studi empiris justru membuktikan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik kerap dihadapkan pada kerentanan tata kelola yang serius, seperti melebarnya jurang ketimpangan informasi, tingginya kecenderungan manipulasi keuntungan (*earnings management*), serta penurunan mutu informasi akuntansi (Preuss & Konigsgruber, 2021). Maka dari itu, perusahaan berkoneksi politik perlu mekanisme pengawasan efektif guna menjaga kredibilitas laporan keuangan, salah satunya melalui penggunaan auditor eksternal yang memiliki kualitas audit tinggi (Wahyuni et al., 2022).

Temuan penelitian mengenai hubungan antara koneksi politik dan pemilihan auditor masih menunjukkan hasil yang beragam. Guedhami et al., (2014) mengungkapkan bahwa

perusahaan berkoneksi politik cenderung memilih auditor berkualitas tinggi guna menaikkan legitimasi perusahaan dan memperkuat kredibilitas laporan keuangan. Sebaliknya, Habib et al., (2017) menemukan bahwa perusahaan berkoneksi politik di Indonesia cenderung memilih auditor non-Big Four. Penelitian yang lebih baru oleh Tantawy & Moussa, (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu koneksi politik melalui direksi dan pemegang saham utama meningkatkan kemungkinan perusahaan memilih auditor Big Four, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah berpotensi memilih auditor non-Big Four. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap pemilihan auditor belum sepenuhnya konsisten dan perlu dikaji berdasarkan sumber koneksinya. Penelitian terdahulu juga masih terbatas dalam membedakan sumber koneksi politik. Padahal, koneksi melalui direksi dan komisaris, pemegang saham utama, maupun kepemilikan pemerintah memiliki karakteristik dan potensi pengaruh yang berbeda terhadap keputusan perusahaan (Preuss & Konigsgruber, 2021).

Penelitian oleh Tantawy & Moussa, (2023) telah membedakan koneksi politik berdasarkan sumbernya, tetapi belum mencakup perusahaan sektor keuangan. Padahal, sektor ini memiliki karakteristik regulasi, pengawasan, dan tuntutan transparansi yang lebih ketat. Oleh karena itu, pengujian pada sektor keuangan diperlukan untuk memperluas bukti empiris mengenai hubungan koneksi politik dengan pemilihan auditor. Selain koneksi politik, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage turut diperhitungkan sebagai variabel kontrol karena dapat memengaruhi kecenderungan pemilihan auditor Big Four. Penggunaannya bertujuan mengisolasi pengaruh koneksi politik agar estimasi model lebih akurat (Tantawy & Moussa, 2023).

Perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung memilih KAP yang mempunyai reputasi tinggi seperti Big Four karena aktivitas operasional lebih kompleks dan perlu kualitas audit lebih baik untuk menaikkan kredibilitas laporan keuangan (Umdiana & Siska, 2021). Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi cenderung lebih memperhatikan kualitas pelaporan keuangan dengan memilih auditor bereputasi tinggi, karena auditor Big Four mempunyai pengalaman, kompetensi, dan reputasi yang dapat meningkatkan kualitas tahapan audit (Wijaya, 2020). Sementara itu, rasio leverage yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan auditor Big Four karena kualitas audit yang lebih tinggi diharapkan mampu mengoptimalkan kredibilitas laporan keuangan di mata kreditur dan investor (Kalbuana et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan periode observasi 2022–2024 karena periode tersebut mencerminkan fase pemulihan sektor keuangan pascapandemi yang disertai perhatian terhadap stabilitas, transparansi, dan penguatan tata kelola (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Selain itu,

rentang waktu tersebut berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sehingga dinamika koneksi politik dalam perusahaan menjadi semakin relevan untuk dikaji.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh koneksi politik dewan direksi dan komisaris, pemegang saham utama, serta kepemilikan pemerintah terhadap pemilihan auditor Big Four pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia. Kebaruan penelitian terletak pada pemisahan sumber koneksi politik dan pengujiannya pada sektor keuangan yang masih terbatas dalam penelitian sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Perspektif keagenan (*Agency Theory*) yang diformulasikan oleh Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* sebagai pemegang saham dan *agent* sebagai pihak manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Adanya dikotomi antara peran kepemilikan dan kendali operasional ini kerap kali menjadi pemicu benturan kepentingan (*conflict of interest*), mengingat motif utilitas dari kedua belah pihak sering kali bertolak belakang. Lebih lanjut, pihak pengelola biasanya mempunyai kontrol penuh atas data operasional internal ketimbang pemilik modal, sehingga memicu problem asimetri informasi yang memicu tindakan oportunistik yang merugikan kepentingan investor (Scott, 2015). Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelaporan keuangan sekaligus mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan (Watts & Zimmerman, 1986).

Untuk mengurangi konflik keagenan dan asimetri informasi tersebut, perusahaan memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif, salah satunya melalui penggunaan auditor eksternal yang independen. Auditor eksternal berperan memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan sehingga informasi yang disampaikan kepada pihak eksternal akhirnya lebih kredibel. Kualitas auditor umumnya dihubungkan dengan reputasi Kantor Akuntan Publik, di mana auditor Big Four dinilai memiliki tingkat independensi, kompetensi, dan kualitas audit yang lebih baik dibanding auditor non-Big Four (DeAngelo, 1981; Wang et al., 2014). Oleh sebab itu, pemilihan auditor eksternal dianggap sebagai salah satu skema tata kelola yang mendukung fungsi monitoring terhadap tindakan manajemen.

Dalam perspektif teori agensi, keberadaan koneksi politik dapat memengaruhi tingkat konflik keagenan sekaligus kebutuhan perusahaan terhadap mekanisme pengawasan. Koneksi politik yang dimiliki direksi dan dewan komisaris (PC_BOD) berpotensi memperkuat posisi manajemen melalui akses terhadap sumber daya, jaringan, maupun dukungan institusional. Kondisi tersebut dapat meningkatkan persepsi terhadap risiko perilaku oportunistik sehingga perusahaan terdorong memakai auditor dengan standar audit yang lebih tinggi. Sementara itu, koneksi politik yang berasal dari pemegang saham utama (PC_BSH) berpotensi memperbesar

konflik pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas yang pada akhirnya dapat menaikkan risiko ekspropriasi serta kebutuhan akan mekanisme monitoring eksternal.

Berbeda dengan kedua bentuk koneksi politik tersebut, kepemilikan pemerintah (PC_GOV) memiliki karakteristik yang khas. Di satu sisi, perusahaan dituntut memenuhi akuntabilitas publik yang lebih tinggi. Di sisi lain, keberadaan pemerintah sebagai pemegang saham dapat memberikan perlindungan politik yang mengurangi tekanan pasar terhadap transparansi pelaporan keuangan. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kebutuhan monitoring maupun keputusan memilih auditor eksternal tidak selalu menunjukkan pola yang sama.

Berdasarkan Agency Theory, keberadaan PC_BOD, PC_BSH, dan PC_GOV berpotensi meningkatkan kompleksitas konflik keagenan serta asimetri informasi dalam perusahaan. Dalam kondisi demikian, pemilihan auditor eksternal menjadi salah satu cara evaluasi yang berfungsi meminimalkan konflik kepentingan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, Agency Theory dipandang sebagai landasan teoretis yang relevan untuk menjelaskan pengaruh berbagai bentuk koneksi politik terhadap keputusan perusahaan dalam memilih auditor eksternal.

Pemilihan Auditor Eksternal

Keputusan perusahaan dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal ialah salah satu unsur penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Auditor independen bertugas memberikan *assurance* atas kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dan dapat digunakan oleh investor maupun pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan (Arens et al., 2017). Dalam praktik audit, KAP yang tergabung dalam jaringan Big Four, yaitu Deloitte, PwC, EY, dan KPMG, umumnya dipersepsikan memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP non-Big Four. Persepsi tersebut didasari reputasi internasional, kompetensi auditor, serta sumber daya lebih memadai dalam melaksanakan prosedur audit (Francis, 2011; DeFond & Zhang, 2014). Selain itu, jejaring Big Four memiliki insentif lebih besar guna mempertahankan independensi dan kualitas audit karena reputasi mereka sangat dipengaruhi oleh kemampuan menjaga kepercayaan publik serta meminimalkan risiko litigasi akibat kegagalan audit (DeAngelo, 1981).

Dalam perspektif Agency Theory, pemilihan auditor eksternal merupakan salah satu mekanisme monitoring yang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Konflik tersebut muncul karena asimetri informasi, dimana kondisi ketika manajemen menguasai informasi perusahaan lebih banyak dibandingkan pemegang saham sehingga berpotensi melakukan tindakan

oportunistik (Jensen & Meckling, 1976). Kehadiran auditor eksternal yang independen membantu mengurangi asimetri informasi dengan memberikan penilaian objektif atas kewajaran laporan keuangan serta menaikkan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada pengguna laporan keuangan (Watts & Zimmerman, 1986). Dalam konteks ini, auditor Big Four dianggap mempunyai kemampuan, independensi, dan kualitas audit yang lebih tinggi dalam mendeteksi salah saji material sehingga mampu menekan agency cost sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola perusahaan (DeFond & Zhang, 2014).

Penelitian ini mengukur pemilihan auditor eksternal dengan variabel dummy yaitu penggunaan auditor Big Four dan non-Big Four. Nilai 1 diberikan kepada perusahaan yang memakai KAP Big Four atau KAP afiliasi Big Four di Indonesia, sedangkan nilai 0 jika perusahaan yang menggunakan KAP non-Big Four. Mengacu pada Habib et al., (2017), KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan jaringan Big Four meliputi Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (PwC), Purwanto, Suherman dan Surja (EY), Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte), serta Siddharta Widjaja dan Rekan (KPMG). Pengukuran tersebut banyak dipakai dalam penelitian auditing karena mampu merepresentasikan perbedaan kualitas audit berdasarkan reputasi, kompetensi, dan independensi auditor (Francis, 2011; DeFond & Zhang, 2014). Maka dari itu, pemilihan auditor Big Four mencerminkan preferensi perusahaan dalam memakai auditor dengan kualitas audit yang lebih tinggi sebagai mekanisme monitoring eksternal untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan mengurangi konflik keagenan.

Pengaruh Koneksi Politik Direksi dan Komisaris terhadap Pemilihan Auditor

Koneksi politik direksi dan komisaris (*Political Connection through Board of Directors*), yang selanjutnya disingkat PC_BOD, menggambarkan kondisi ketika anggota direksi atau dewan komisaris memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah, anggota legislatif, partai politik, maupun institusi negara lainnya (Faccio, 2006). Keberadaan koneksi tersebut dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti kemudahan memperoleh akses terhadap sumber daya, dukungan regulasi, pendanaan, maupun peluang memperoleh kontrak pemerintah (Houston et al., 2014). Di sisi lain, hubungan politik yang dimiliki jajaran dewan juga dapat memperkuat pengaruh manajemen dalam proses pengambilan keputusan sehingga meningkatkan potensi konflik keagenan dan asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan investor terhadap kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Temuan Preuss & Konigsgruber, (2021) menunjukkan bahwa koneksi politik ialah salah satu faktor yang memengaruhi praktik tata kelola perusahaan, transparansi pelaporan keuangan, serta kebutuhan perusahaan terhadap mekanisme monitoring eksternal.

Berdasarkan Agency Theory, meningkatnya konflik keagenan dan asimetri informasi mendorong perusahaan untuk memperkuat mekanisme pengawasan guna membatasi perilaku oportunistik manajemen dan menjaga kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Skema tersebut adalah penggunaan auditor eksternal yang memiliki standar audit tinggi. Auditor Big Four dipandang mempunyai independensi, kompetensi, pengalaman, serta sumber daya yang lebih baik disbanding dengan auditor non-Big Four sehingga lebih mampu mendeteksi salah saji material dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan (DeFond & Zhang, 2014). Selain itu, reputasi global yang dimiliki auditor Big Four mendorong penerapan prosedur audit yang lebih ketat serta menjaga independensi selama proses audit berlangsung (Knechel et al., 2013).

Dengan demikian, perusahaan dengan koneksi politik pada tingkat direksi dan komisaris diperkirakan cenderung memilih auditor Big Four sebagai mekanisme monitoring eksternal. Penggunaan auditor bereputasi tinggi diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi, menekan konflik keagenan, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas pelaporan keuangan. Di samping itu, pemilihan auditor Big Four juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih kredibel.

Bukti empiris menunjukkan bahwa koneksi politik dapat berkaitan dengan kecenderungan perusahaan memilih auditor berkualitas, meskipun hubungan tersebut dipengaruhi oleh konteks perusahaan. Guedhami et al., (2014) menunjukkan bahwa perusahaan berkoneksi politik cenderung menggunakan auditor berkualitas tinggi untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan investor. Temuan tersebut sejalan dengan Tantawy & Moussa, (2023) yang menemukan bahwa koneksi politik direksi dan komisaris meningkatkan kemungkinan pemilihan auditor Big Four. Namun, Habib et al., (2017) menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik dalam konteks Indonesia juga berkaitan dengan karakteristik tata kelola dan transaksi pihak berelasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik dapat bergantung pada karakteristik perusahaan dan lingkungan institusional. Pada sektor keuangan Indonesia, hubungan tersebut perlu diuji karena karakteristik regulasi dan pengawasannya berbeda dari sektor lainnya.

H1: Koneksi politik direksi dan komisaris berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor Big Four.

Pengaruh Koneksi Politik Pemegang Saham Utama terhadap Pemilihan Auditor

Koneksi politik pemegang saham utama (*Political Connection through Major Shareholders*) atau PC_BSH menggambarkan kondisi ketika pemegang saham pengendali memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah, anggota legislatif, partai politik, maupun

institusi negara lainnya (Faccio, 2006). Sebagai pihak yang memiliki hak pengendalian terbesar, pemegang saham utama berperan penting dalam menentukan berbagai kebijakan strategis perusahaan, termasuk keputusan terkait penunjukan auditor eksternal (Claessens et al., 2000). Hubungan politik tersebut dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti kemudahan memperoleh akses pendanaan, dukungan regulasi, peluang mendapatkan kontrak pemerintah, serta akses terhadap berbagai sumber daya strategis (Faccio, 2006; Houston et al., 2014). Namun demikian, besarnya kekuasaan yang dimiliki pemegang saham pengendali juga dapat meningkatkan potensi konflik keagenan, khususnya antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas, akibat kemungkinan terjadinya tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok pengendali.

Dalam perspektif Agency Theory, konsentrasi kepemilikan yang disertai dengan koneksi politik dapat menaikkan asimetri informasi serta risiko ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk memperkuat mekanisme monitoring agar konflik keagenan dapat diminimalkan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dengan kualitas pelaporan keuangan. Salah satu bentuk monitoring yang dapat digunakan adalah penunjukan auditor eksternal dengan kualitas audit tinggi. Auditor Big Four dipandang memiliki independensi, kompetensi, dan reputasi yang lebih baik dibandingkan auditor non-Big Four sehingga lebih mampu meningkatkan kualitas audit serta memberikan keyakinan yang lebih besar atas keandalan laporan keuangan perusahaan (DeAngelo, 1981; Francis, 2011). Di samping itu, auditor Big Four mempunyai insentif reputasi yang tinggi sehingga cenderung menjalankan proses audit secara lebih independen serta menerapkan prosedur audit yang lebih ketat (Knechel et al., 2013).

Berdasarkan landasan teori tersebut, perusahaan yang memiliki pemegang saham utama dengan koneksi politik diperkirakan memiliki kecenderungan lebih besar untuk memilih auditor Big Four. Penggunaan auditor bereputasi tinggi diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi, membatasi potensi ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas, serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Selain itu, keputusan menggunakan auditor Big Four juga dapat menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk penerapan tata kelola yang baik dan menjaga kepercayaan investor meskipun struktur kepemilikannya memiliki hubungan politik.

Temuan empiris sebelumnya menunjukkan bahwa koneksi politik pada struktur kepemilikan dapat berkaitan dengan penggunaan auditor berkualitas. Guedhami et al., (2014) menemukan bahwa perusahaan berkoneksi politik cenderung memilih auditor berkualitas tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan Tantawy & Moussa, (2023) yang menunjukkan bahwa koneksi politik pemegang saham utama

meningkatkan kemungkinan perusahaan memilih auditor Big Four. Namun, Habib et al., (2017) menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik dalam konteks Indonesia turut dipengaruhi oleh karakteristik tata kelola perusahaan. Perbedaan konteks tersebut menunjukkan bahwa hubungan koneksi politik pemegang saham utama dengan pemilihan auditor masih perlu diuji pada sektor keuangan Indonesia.

H2: Koneksi politik pemegang saham utama berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor Big Four.

Pengaruh Koneksi Politik Kepemilikan Pemerintah terhadap Pemilihan Auditor

Koneksi politik melalui kepemilikan pemerintah (*Political Connection through Government Ownership*) atau PC_GOV menggambarkan kondisi ketika pemerintah memiliki saham pada suatu perusahaan, baik sebagai pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Keterlibatan pemerintah sebagai pemegang saham menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perusahaan dan negara sehingga pemerintah memiliki pengaruh terhadap berbagai keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam penunjukan auditor eksternal (Faccio, 2006). Selain memberikan akses terhadap berbagai sumber daya, dukungan regulasi, dan peluang memperoleh kontrak pemerintah, kepemilikan pemerintah juga menyebabkan perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi, namun pada pemenuhan kepentingan sosial dan kebijakan publik (Shleifer & Vishny, 1994).

Dalam perspektif Agency Theory, kepemilikan pemerintah menciptakan hubungan keagenan yang lebih kompleks karena perusahaan harus mengakomodasi kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham di samping kepentingan investor lainnya (Jensen & Meckling, 1976). Berbeda dengan koneksi politik yang berasal dari direksi, komisaris, maupun pemegang saham utama, kepemilikan pemerintah memberikan legitimasi dan dukungan institusional secara langsung kepada perusahaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi tekanan dari pasar untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan melalui penggunaan auditor dengan reputasi tinggi. Di sisi lain, penggunaan auditor Big Four yang menerapkan standar audit lebih ketat berpotensi meningkatkan transparansi dan membatasi fleksibilitas perusahaan dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah maupun tujuan nonkomersial.

Berdasarkan argumentasi tersebut, perusahaan yang memiliki kepemilikan pemerintah diperkirakan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk memilih auditor Big Four dibandingkan perusahaan tanpa kepemilikan pemerintah. Keberadaan pemerintah sebagai pemegang saham dapat dipandang sebagai bentuk mekanisme monitoring internal yang mengurangi kebutuhan perusahaan terhadap monitoring eksternal melalui auditor bereputasi tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih memungkinkan

menggunakan auditor non-Big Four yang dianggap memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pelaksanaan audit dan pengungkapan informasi perusahaan.

Berbeda dengan koneksi politik pada direksi, komisaris, dan pemegang saham utama, penelitian terdahulu menunjukkan pola yang relatif konsisten mengenai kepemilikan pemerintah. Wang et al., (2014) dan Guedhami et al., (2014) menemukan bahwa kepemilikan pemerintah berkaitan dengan kecenderungan yang lebih rendah dalam memilih auditor Big Four karena pemerintah dapat berfungsi sebagai mekanisme monitoring alternatif. Temuan tersebut diperkuat oleh Tantawy & Moussa, (2023) yang juga menemukan pengaruh negatif kepemilikan pemerintah terhadap pemilihan auditor Big Four. Dalam konteks Indonesia, Joceline & Soepriyanto, (2023) turut menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan pemerintah dan keputusan pemilihan auditor. Meskipun arah temuan relatif konsisten, bukti pada sektor keuangan Indonesia masih terbatas sehingga hubungan tersebut perlu diuji lebih lanjut.

H3: Koneksi Politik Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap pemilihan auditor Big Four.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap pemilihan auditor dapat berbeda berdasarkan sumber koneksi dan karakteristik perusahaan. Meskipun Tantawy & Moussa, (2023) telah membedakan koneksi politik berdasarkan direksi dan komisaris, pemegang saham utama, serta kepemilikan pemerintah, penelitian tersebut belum mencakup perusahaan sektor keuangan. Padahal, sektor ini memiliki karakteristik regulasi dan pengawasan yang lebih spesifik. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara terpisah PC_BOD, PC_BSH, dan PC_GOV terhadap pemilihan auditor Big Four pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

Berdasarkan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan, hubungan antarvariabel penelitian dirangkum dalam kerangka penelitian yang disajikan pada Gambar 2. (lihat Gambar 2).

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020).

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal guna menganalisis pengaruh koneksi politik dewan direksi dan komisaris, koneksi politik pemegang saham utama, serta kepemilikan pemerintah terhadap pemilihan auditor eksternal pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik

biner sebagaimana diterapkan dalam penelitian Habib et al., (2017); Guedhami et al., (2014); Tantawy & Moussa, (2023).

Populasi, Sampel dan Sumber Data Penelitian

Populasi penelitian yaitu seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Periode tersebut dipilih karena merupakan fase pemulihan sektor keuangan pasca pandemi sekaligus berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sehingga isu koneksi politik perusahaan menjadi semakin relevan untuk dikaji.

Penelitian menggunakan data sekunder mengacu pada laporan tahunan, laporan keuangan, situs resmi Bursa Efek Indonesia, dan website resmi perusahaan. Identifikasi koneksi politik dilakukan melalui penelusuran profil direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham utama berdasarkan pendekatan Faccio, (2006); Habib et al., (2017); Ahmad et al., (2022); Tantawy & Moussa, (2023).

Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* mengacu pada ketersediaan laporan tahunan, laporan keuangan, dan kelengkapan data seluruh variabel penelitian selama periode 2022-2024 (Sugiyono, 2019). Berdasarkan proses seleksi diperoleh 103 perusahaan dengan total 309 observasi perusahaan-tahun. Proses seleksi sampel disajikan pada Tabel 1 (lihat Tabel 1), sedangkan definisi operasional variabel ditampilkan pada Tabel 2 (lihat Tabel 2).

Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan regresi logistik biner (*binary logistic regression*) dikarenakan variabel dependen adalah variabel dikotomis yang membedakan perusahaan pengguna auditor Big Four dan non-Big Four. Regresi logistik merupakan metode yang umum digunakan untuk mengestimasi probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan kombinasi beberapa variabel independen serta banyak diterapkan dalam penelitian di bidang *auditing*, *corporate governance*, dan *political connection* (Gujarati & Porter, 2009; Hosmer et al., 2013). Oleh sebab itu, model ini dinilai sesuai untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam pemilihan auditor eksternal. Selanjutnya model empiris dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 PC_{BOD,it} + \beta_2 PC_{BSH,it} + \beta_3 PC_{GOV,it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 PROF_{it} + \beta_6 LEV_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Pi	= Probabilitas perusahaan memilih auditor Big Four
PC_BOD	= Koneksi politik dewan direksi dan komisaris
PC_BSH	= Koneksi politik pemegang saham utama
PC_GOV	= Kepemilikan pemerintah
SIZE	= Ukuran perusahaan
PROF	= Profitabilitas

LEV	= Leverage
β_0	= Konstanta
β_1 – β_6	= Koefisien regresi
ε_{it}	= Error term
i	= Perusahaan
t	= Tahun pengamatan

Sebagai instrumen pengujian tambahan, penelitian ini menerapkan regresi probit sebagai *robustness test* untuk mengevaluasi konsistensi hasil estimasi. Berbeda dengan regresi logistik yang menggunakan distribusi logistik, model probit mengestimasi probabilitas berdasarkan distribusi normal kumulatif (Gujarati & Porter, 2009). Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa arah maupun tingkat signifikansi koefisien regresi tetap konsisten sehingga hasil pengujian memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.

Teknik Analisis Data

Analisis data diproses melalui beberapa tahap, diawali dengan pengumpulan, verifikasi, dan pengkodean data sesuai definisi operasional setiap variabel penelitian. Selanjutnya, Selanjutnya, winsorization diterapkan pada variabel profitabilitas dan leverage pada persentil 1% dan 99% untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrem tanpa menghilangkan observasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas estimasi model (Wooldridge, 2019). *Winsorization* digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan untuk mengurangi distorsi akibat nilai ekstrem pada data perusahaan (Habib et al., 2017).

Tahap berikutnya adalah distribusi frekuensi untuk mengetahui distribusi masing-masing variabel dummy dan selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif guna menyajikan karakteristik data penelitian. Penelitian ini juga menjalankan uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Meskipun regresi logistik tidak mensyaratkan uji asumsi klasik seperti normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, pengujian multikolinearitas tetap dibutuhkan untuk memastikan tidak dijumpai korelasi yang tinggi antarvariabel independen yang dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien regresi. Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika seluruh nilai VIF berada di bawah 10 (Hair et al., 2019).

Hipotesis penelitian diuji melalui analisis regresi logistik biner yang mengevaluasi signifikansi koefisien masing-masing koefisien regresi. Kelayakan model dinilai berdasarkan Log Likelihood, Likelihood Ratio (LR) Chi-Square, dan Pseudo R-Square, sedangkan hipotesis dinyatakan didukung apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Untuk menguji konsistensi hasil estimasi, penelitian ini juga menerapkan regresi probit sebagai *robustness test*. Konsistensi arah dan tingkat signifikansi koefisien antara kedua model digunakan sebagai dasar untuk menilai keandalan hasil penelitian sehingga kesimpulan yang diperoleh memiliki dukungan empiris yang lebih kuat (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi dipaparkan untuk memberikan gambaran mengenai proporsi observasi pada variabel penelitian yang diukur menggunakan variabel dummy. Variabel tersebut meliputi pemilihan auditor, koneksi politik dewan direksi dan komisaris, koneksi politik pemegang saham utama, serta kepemilikan pemerintah. Distribusi frekuensi masing-masing variabel penelitian disajikan pada Tabel 3 (lihat Tabel 3).

Berdasarkan hasil yang tercantum pada tabel 3, penelitian ini menggunakan 309 pengamatan perusahaan-tahun yang berasal dari perusahaan sektor keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Pada variabel pemilihan auditor, sebanyak 109 observasi (35,28%) menggunakan auditor yang bertaraf Big Four, sedangkan 200 observasi (64,72%) menggunakan auditor bertaraf non-Big Four. Temuan tersebut memperlihatkan sebagian besar perusahaan sektor keuangan dalam sampel masih menggunakan auditor non-Big Four.

Selanjutnya, pada variabel koneksi politik dewan direksi dan komisaris (PC_BOD), terdapat 25 observasi (8,09%) yang memiliki minimal satu anggota direksi atau komisaris dengan koneksi politik, sedangkan 284 observasi (91,91%) tidak memiliki karakteristik tersebut. Pada variabel koneksi politik pemegang saham utama (PC_BSH), hanya 9 observasi (2,91%) yang memiliki pemegang saham utama berkoneksi politik, sementara 300 observasi (97,09%) tidak memiliki koneksi politik. Adapun pada variabel kepemilikan pemerintah (PC_GOV), sebanyak 30 observasi (9,71%) memiliki kepemilikan pemerintah minimal 20%, sedangkan 279 observasi (90,29%) tidak memiliki kepemilikan pemerintah sesuai dengan kriteria penelitian. Secara umum, hasil tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik dalam sampel penelitian masih relatif sedikit.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi sebagai gambaran karakteristik data dari variabel kontrol yang digunakan penelitian ini. Informasi yang disajikan yaitu jumlah observasi (*observation*), nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), nilai minimum (*minimum*), dan nilai maksimum (*maximum*). Temuan statistik deskriptif disajikan pada tabel 4 (lihat Tabel 4).

Berdasarkan Tabel 4, penelitian ini menggunakan 309 observasi perusahaan-tahun yang berasal dari sektor keuangan dan terdaftar di BEI selama periode 2022-2024. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai rata-rata sebesar 29,824 dengan standar deviasi 2,475, nilai minimum 21,910, dan nilai maksimum 35,430, yang menunjukkan munculnya variasi ukuran perusahaan di sampel penelitian. Variabel profitabilitas (PROF) mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,002 dengan standar deviasi 0,075, dan rentang nilai antara -0,380 hingga 0,120, yang

mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan relatif rendah dengan variasi kinerja antarperusahaan. Sementara itu, variabel leverage (LEV) mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,580 dengan standar deviasi 0,319, nilai minimum 0,000, dan nilai maksimum 1,940, yang menunjukkan bahwa tingkat penggunaan utang perusahaan dalam sampel cukup bervariasi.

Uji Multikolinearitas

Sebelum menjalankan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu diuji dari kemungkinan terjadinya multikolinearitas, yakni kondisi ketika variabel independen masing-masing berkorelasi tinggi. Keberadaan multikolinearitas bisa memperkecil kestabilan estimasi koefisien regresi dan memengaruhi ketepatan penafsiran temuan. Riset ini memakai Variance Inflation Factor (VIF) sebagai alat uji, dengan nilai VIF di bawah 10 pada setiap variabel independen memperlihatkan bahwa model regresi bebas dari persoalan multikolinearitas sebagaimana disajikan pada tabel 5 (lihat Tabel 5).

Berdasarkan Tabel 5, semua variabel independen menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah batas maksimum 10, yaitu berkisar antara 1,22 hingga 1,75 dengan nilai rata-rata (*mean VIF*) sebesar 1,41. Temuan tersebut mengindikasikan tidak ada korelasi yang tinggi antarvariabel independen, dengan demikian model regresi terbebas dari multikolinearitas dan layak digunakan dalam analisis regresi logistik.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dijalankan memakai analisis regresi logistik karena variabel dependen, yaitu pemilihan auditor eksternal, diukur menggunakan variabel dummy yang terdiri atas dua kategori, yaitu perusahaan yang memakai auditor Big Four dan non-Big Four. Kajian regresi logistik dipakai ketika variabel dependen bersifat biner, akibatnya tidak memerlukan asumsi normalitas seperti halnya pada regresi linier (Hosmer et al., 2013). Sebelum menginterpretasikan temuan pengujian hipotesis, langkah awal yaitu penilaian terhadap kelayakan model regresi logistik guna mengonfirmasi bahwa model yang akan digunakan layak dalam menguraikan hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil pengujian kelayakan model regresi logistik diuraikan pada tabel 6 (lihat Tabel 6).

Berdasarkan Tabel 6, model regresi logistik memiliki nilai LR Chi-square sebesar 90,710 dengan nilai signifikansi ($\text{Prob} > \text{Chi-square}$) sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan sehingga layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Nilai Pseudo R^2 sebesar 0,226 mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup untuk menjelaskan variasi pemilihan auditor, sedangkan variasi lainnya disebabkan oleh faktor-faktor di luar model penelitian. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik disajikan pada Tabel 7 (lihat Tabel 7).

Berdasarkan Tabel 7, variabel koneksi politik dewan direksi dan komisaris (PC_BOD) memiliki koefisien sebesar 2,181, odds ratio sebesar 8,856, dan p-value sebesar 0,005, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan auditor Big Four. Sebaliknya, variabel koneksi politik pemegang saham utama (PC_BSH) memiliki koefisien sebesar 1,032, odds ratio sebesar 2,807, dan p-value sebesar 0,369, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor Big Four. Sementara itu, variabel kepemilikan pemerintah (PC_GOV) memiliki koefisien sebesar -1,830, odds ratio sebesar 0,160, dan p-value sebesar 0,015, yang membuktikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pemilihan auditor Big Four. Untuk variabel kontrol, ukuran perusahaan (SIZE) dan profitabilitas (PROF) berpengaruh positif dan signifikan dengan p-value masing-masing sebesar 0,000 dan 0,018, sedangkan leverage (LEV) memiliki pengaruh negative yang signifikan pada taraf 10% dan p-value sebesar 0,072.

Pengaruh Koneksi Politik Dewan Direksi dan Komisaris terhadap Pemilihan Auditor

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis, koneksi politik dewan direksi dan komisaris (PC_BOD) terbukti berpengaruh positif dan bermakna terhadap pemilihan auditor Big Four. Hasil regresi memperlihatkan koefisien sebesar 2,181, odds ratio sebesar 8,856, dan p-value sebesar 0,005 ($< 0,05$). Nilai koefisien yang positif membuktikan bahwa keberadaan koneksi politik pada dewan direksi dan komisaris menaikkan kecenderungan perusahaan untuk memilih auditor Big Four. Di samping itu, nilai odds ratio sebesar 8,856 mengindikasikan bahwa perusahaan yang mempunyai minimal satu anggota direksi atau komisaris yang berkoneksi politik memiliki peluang sekitar 8,856 kali lebih besar untuk memilih auditor Big Four disbanding dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Oleh sebab itu, Hipotesis 1 diterima.

Hasil riset ini menopang Agency Theory yang menguraikan bahwa keberadaan koneksi politik pada direksi dan komisaris berpotensi meningkatkan konflik keagenan dan asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Anggota dewan direksi dan komisaris yang mempunyai koneksi politik lazimnya memiliki akses yang lebih besar terhadap asal daya, dukungan regulasi, maupun jaringan pemerintah yang dapat memperkuat posisi manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pemegang saham terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik dan menciptakan kebutuhan akan cara kerja monitoring yang lebih berdaya guna. Dalam sudut pandang teori agensi, auditor eksternal berkualitas tinggi merupakan salah satu mekanisme monitoring yang mampu memperkecil asimetri informasi, menaikkan kredibilitas laporan keuangan, serta menyajikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa laporan keuangan telah diaudit secara independen.

Temuan penelitian ini mengemukakan bahwa pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia, keberadaan koneksi politik pada direksi dan komisaris sebenarnya mendorong perusahaan untuk memperkuat mekanisme pengawasan melalui penggunaan auditor Big Four. Kondisi ini mungkin dipengaruhi oleh karakteristik khusus sektor keuangan yang memiliki tingkat pengawasan regulasi yang tinggi serta sangat bergantung pada kepercayaan investor dan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, perusahaan yang mempunyai koneksi politik menghadapi tuntutan yang lebih besar untuk membuktikan bahwa laporan keuangannya disusun secara andal dan dapat dipercaya. Maka dari itu, penggunaan auditor Big Four menjadi salah satu usaha perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan sekaligus mengurangi kekhawatiran pemegang saham terhadap risiko yang timbul akibat adanya koneksi politik dalam struktur dewan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Guedhami et al., (2014) yang mengemukakan perusahaan berkoneksi politik cenderung memilih auditor berkualitas tinggi sebagai mekanisme guna menaikkan kredibilitas laporan keuangan serta mengurangi kekhawatiran investor terhadap risiko politik. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Tantawy & Moussa, (2023) yang membuktikan bahwa koneksi politik pada direksi dan komisaris meningkatkan kemungkinan perusahaan memilih auditor Big Four.

Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik pada tingkat dewan tidak selalu dimanfaatkan untuk melemahkan fungsi pengawasan perusahaan, tetapi justru mendorong perusahaan memperkuat mekanisme monitoring melalui penggunaan auditor eksternal yang memiliki reputasi, independensi, dan kualitas audit yang lebih tinggi. Hasil analisis juga mengindikasikan pengaruh koneksi politik terhadap pemilihan auditor tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada sumber koneksi politik yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini, koneksi politik yang berasal dari dewan direksi dan komisaris terbukti mendorong perusahaan memilih auditor Big Four, sedangkan bentuk koneksi politik lainnya menunjukkan hasil yang berbeda.

Pengaruh Koneksi Politik Pemegang Saham Utama terhadap Pemilihan Auditor

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis, koneksi politik pemegang saham utama (PC_BSH) tidak terbukti berpengaruh bermakna terhadap pemilihan auditor Big Four. Hasil regresi memperlihatkan koefisien sebesar 1,032, odds ratio sebesar 2,807, dan p-value sebesar 0,369 ($> 0,05$). Meskipun nilai koefisien menunjukkan arah pengaruh positif dan odds ratio mengindikasikan bahwa perusahaan yang mempunyai pemegang saham utama berkoneksi politik memiliki peluang sekitar 2,807 kali lebih besar untuk memilih auditor Big Four, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh sebab itu, Hipotesis kedua ditolak.

Dalam sudut pandang Agency Theory, pemegang saham utama memang memiliki hak pengendalian yang besar terhadap perusahaan akibatnya berpotensi menimbulkan konflik keagenan, terutama antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Namun, hasil riset ini menunjukkan bahwa koneksi politik yang dimiliki pemegang saham utama tidak secara langsung memengaruhi keputusan pemilihan auditor eksternal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa cara kerja tata kelola perusahaan pada sektor keuangan mampu membatasi pengaruh pemegang saham utama terhadap keputusan yang berhubungan dengan fungsi monitoring eksternal. Dengan demikian, keputusan pemilihan auditor lebih didasarkan pada kebutuhan perusahaan dalam memenuhi prinsip tata kelola, independensi audit, dan kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan kepentingan politik pemegang saham pengendali.

Temuan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik perusahaan sektor keuangan di Indonesia yang berada di bawah pengawasan regulator serta memiliki tuntutan transparansi yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Dalam praktiknya, keputusan mengenai penunjukan auditor eksternal lazimnya melibatkan dewan komisaris, komite audit, dan mekanisme tata kelola lainnya sehingga pengaruh pemegang saham utama terhadap keputusan tersebut menjadi lebih terbatas. Maka dari itu, meskipun pemegang saham utama memiliki koneksi politik, keberadaan koneksi tersebut belum tentu menjadi aspek utama yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan auditor eksternal.

Di samping itu, ketidaksignifikanan hasil penelitian juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik data penelitian. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, hanya sekitar 2,91% pengamatan yang memiliki koneksi politik pada pemegang saham utama. Proporsi yang relatif kecil tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik melalui pemegang saham utama masih terbatas dalam sampel. Kondisi ini dapat membatasi variasi data sehingga hubungan yang diuji belum menunjukkan signifikansi statistik.

Hasil temuan ini tidak mendukung penelitian Tantawy & Moussa, (2023) yang menemukan bahwa koneksi politik pemegang saham utama meningkatkan kemungkinan perusahaan memilih auditor Big Four. Perbedaan temuan tersebut diprediksi disebabkan oleh perbedaan karakteristik sampel penelitian. Penelitian Tantawy & Moussa, (2023) memakai perusahaan nonkeuangan di Mesir, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia yang memiliki tingkat regulasi, pengawasan, dan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih ketat. Namun demikian, temuan ini sejalan dengan Habib et al., (2017) yang membuktikan pengaruh koneksi politik terhadap keputusan perusahaan tidak selalu konsisten pada setiap sumber koneksi politik. Dengan demikian, temuan penelitian ini mengemukakan bahwa tidak semua bentuk koneksi politik memiliki pengaruh yang sama terhadap keputusan pemilihan auditor eksternal.

Pengaruh Koneksi Politik Kepemilikan Pemerintah terhadap Pemilihan Auditor

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis, kepemilikan pemerintah (PC_GOV) terbukti berpengaruh negatif dan bermakna terhadap pemilihan auditor Big Four. Hasil regresi memperlihatkan koefisien sebesar -1,830, odds ratio sebesar 0,160, dan p-value sebesar 0,015 ($< 0,05$). Koefisien negatif menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah menurunkan kecenderungan pemilihan auditor Big Four. Odds ratio sebesar 0,160 menunjukkan bahwa pemilihan auditor Big Four pada perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih rendah dibandingkan perusahaan tanpa kepemilikan pemerintah, dengan variabel lain konstan. Oleh sebab itu, Hipotesis 3 diterima.

Hasil riset ini menopang Agency Theory yang menguraikan bahwa kepemilikan pemerintah menciptakan karakteristik hubungan keagenan yang berbeda dibandingkan perusahaan swasta. Kehadiran pemerintah sebagai pemegang saham tidak hanya membawa sasaran ekonomi, namun juga kepentingan sosial, politik, dan pembangunan nasional. Perbedaan tujuan tersebut mengakibatkan hubungan keagenan menjadi lebih kompleks karena manajemen harus mempertimbangkan beragam kepentingan dalam tahapan pengambilan keputusan. Dalam kondisi demikian, cara kerja monitoring perusahaan tidak hanya berasal dari auditor eksternal, tetapi juga dari pemerintah sebagai pemegang saham, regulator, serta berbagai lembaga pengawas lainnya. Akibatnya, kebutuhan perusahaan terhadap mekanisme monitoring tambahan melalui auditor Big Four menjadi relatif lebih rendah.

Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung tidak menjadikan auditor Big Four sebagai mekanisme utama dalam memperkecil konflik keagenan. Hal tersebut dapat disebabkan karena perusahaan telah memperoleh pengawasan dari berbagai mekanisme eksternal yang melekat pada status kepemilikan pemerintah, akibatnya kebutuhan untuk memakai auditor dengan reputasi internasional menjadi relatif lebih kecil dibandingkan perusahaan swasta. Artinya, keberadaan pemerintah sebagai pemegang saham dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan alternatif dan dapat mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap auditor Big Four sebagai sarana monitoring eksternal.

Kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik perusahaan sektor keuangan di Indonesia yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta berbagai ketentuan tata kelola yang ketat. Perusahaan yang memiliki kepemilikan pemerintah pada lazimnya juga menghadapi pengawasan dari kementerian atau instansi pemerintah terkait sebagai representasi pemegang saham negara. Adanya berbagai lapis pengawasan tersebut memungkinkan perusahaan tetap memenuhi tuntutan akuntabilitas dan kepatuhan tanpa harus selalu menggunakan auditor Big Four. Maka dari itu, dalam konteks perusahaan sektor keuangan, kepemilikan pemerintah justru berkorelasi dengan kecenderungan lebih rendah untuk menggunakan auditor Big Four.

Temuan ini konsisten dengan temuan Guedhami et al., (2009) yang mengungkapkan bahwa semakin besar kepemilikan pemerintah di perusahaan maka semakin kecil perusahaan kemungkinan menunjuk auditor Big Four. Sejalan dengan Wang et al., (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki kecenderungan lebih rendah menggunakan auditor Big Four dibandingkan perusahaan nonpemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung penelitian Tantawy & Moussa, (2023) yang membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap pemilihan auditor Big Four. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah adalah salah satu bentuk koneksi politik yang dapat mengurangi kebutuhan perusahaan terhadap mekanisme monitoring melalui auditor eksternal berkualitas tinggi karena perusahaan telah memperoleh pengawasan dari berbagai institusi pemerintah.

Pembahasan Variabel Kontrol

Temuan pengujian memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif dan bermakna terhadap pemilihan auditor Big Four, dengan koefisien sebesar 0,518, odds ratio sebesar 1,679, dan p-value sebesar 0,000. Temuan ini membuktikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk memakai auditor Big Four. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui Agency Theory, yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang skala usahanya lebih besar umumnya memiliki aktivitas operasional lebih kompleks, jumlah transaksi lebih banyak, serta tingkat asimetri informasi lebih tinggi antara manajemen dan pemegang saham. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan cara kerja pengawasan eksternal yang lebih andal melalui auditor yang memiliki reputasi, independensi, dan kualitas audit yang tinggi. Di samping itu, perusahaan besar juga berada di bawah pengawasan regulator dan investor yang lebih intensif akibatnya pemilihan auditor Big Four menjadi salah satu mekanisme guna menaikkan kredibilitas laporan keuangan.

Selanjutnya, profitabilitas (PROF) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan auditor Big Four, dengan koefisien sebesar 10,121, odds ratio sebesar 24.864,160, dan p-value sebesar 0,018. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menggunakan auditor Big Four. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu membuahkan laba cenderung berupaya mempertahankan kualitas pelaporan keuangan melalui penggunaan auditor yang bereputasi baik. Di samping itu, perusahaan yang lebih menguntungkan lazimnya memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menanggung biaya audit yang relatif lebih tinggi, sehingga lebih memungkinkan memilih auditor Big Four dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas yang rendah.

Berbeda dengan kedua variabel tersebut, leverage (LEV) memiliki koefisien sebesar -1,177, odds ratio sebesar 0,308, dan p-value sebesar 0,072, sehingga menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan pada taraf signifikansi 10% terhadap pemilihan auditor Big Four. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka semakin rendah peluang perusahaan untuk memilih auditor Big Four. Meskipun demikian, pengaruh leverage relatif lebih lemah dibandingkan variabel lain yang signifikan pada taraf 5% maupun 1%. Pada perusahaan sektor keuangan, kondisi tersebut diduga berhubungan dengan kuatnya pengawasan regulator serta penerapan tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan, sehingga keputusan dalam memilih auditor tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat leverage, tetapi juga oleh beragam aspek lain yang turut menjadi pertimbangan perusahaan.

Robustness Test

Robustness test dilakukan untuk menguji keandalan hasil penelitian dengan memastikan bahwa hubungan antarvariabel tetap konsisten ketika dianalisis menggunakan model estimasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, robustness test dilakukan menggunakan regresi probit sebagai model alternatif dari regresi logistik. Regresi probit dipilih karena memiliki tujuan yang sama dalam mengestimasi probabilitas variabel dependen dikotomis, namun menggunakan fungsi distribusi normal kumulatif sebagai dasar estimasi. Hasil *robustness test* disajikan pada tabel 8 (lihat Tabel 8).

Berdasarkan Tabel 8, hasil robustness test menggunakan regresi probit menunjukkan bahwa arah koefisien dan tingkat signifikansi variabel utama tetap konsisten dengan hasil regresi logistik. Variabel PC_BOD tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan auditor Big Four (p-value = 0,002), sedangkan PC_GOV tetap berpengaruh negatif dan signifikan (p-value = 0,012). Sebaliknya, PC_BSH tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor Big Four (p-value = 0,339). Untuk variabel kontrol, SIZE dan PROF tetap berpengaruh positif dan signifikan dengan p-value masing-masing sebesar 0,000 dan 0,007, sedangkan LEV tetap menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan pada taraf signifikansi 10% (p-value = 0,077).

Secara keseluruhan, hasil robustness test menunjukkan bahwa temuan penelitian bersifat robust karena menghasilkan arah pengaruh dan tingkat signifikansi yang relatif konsisten antara model regresi logistik dan regresi probit. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak sensitif terhadap perbedaan metode estimasi yang digunakan, sehingga meningkatkan keandalan dan validitas temuan penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji pengaruh koneksi politik dewan direksi dan komisaris, koneksi politik pemegang saham utama, serta kepemilikan pemerintah terhadap

pemilihan auditor Big Four pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Temuan kajian memperlihatkan bahwa koneksi politik dewan direksi dan komisaris berpengaruh positif terhadap kecenderungan perusahaan memilih auditor Big Four. Sebaliknya, kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap pemilihan auditor Big Four, sedangkan koneksi politik pemegang saham utama tidak terbukti memengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih auditor Big Four. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap pemilihan auditor berbeda-beda sesuai dengan asal koneksi politik dalam struktur perusahaan. Temuan penelitian ini juga memperkuat Agency Theory yang menguraikan bahwa karakteristik koneksi politik memengaruhi kebutuhan perusahaan terhadap cara kerja monitoring melalui auditor eksternal.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik koneksi politik perlu menjadi salah satu pertimbangan perusahaan, terutama di sektor keuangan, dalam menentukan auditor eksternal sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan. Bagi regulator, temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang mempunyai koneksi politik guna menjaga independensi auditor dan menaikkan kredibilitas pelaporan keuangan. Di samping itu, investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan informasi mengenai koneksi politik sebagai salah satu pertimbangan evaluasi kualitas tata kelola perusahaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengukuran koneksi politik menggunakan variabel dummy yang belum mencerminkan kekuatan, intensitas, maupun kualitas hubungan politik. Selain itu, penelitian hanya menguji tiga bentuk koneksi politik dan menggunakan variabel kontrol yang terbatas pada ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pengukuran koneksi politik yang lebih komprehensif, mempertimbangkan bentuk koneksi lainnya, menambahkan variabel yang relevan, serta memperluas objek penelitian ke sektor lain agar hasilnya dapat digeneralisasika pada konteks yang lebih luas.

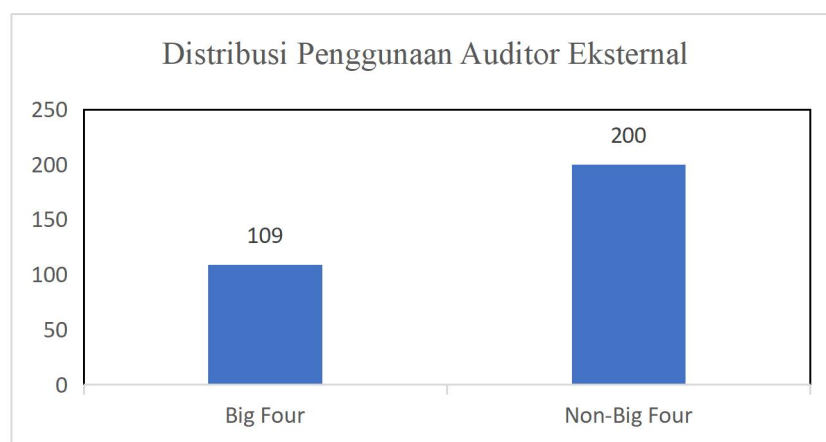
DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., Bradbury, M., & Habib, A. (2022). *Political connections , political uncertainty and audit fees : evidence from Pakistan*. 37(2), 255–282. <https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2020-2715>
- Alhadab, M., Abdullatif, M., Ahmed, H., Tahat, Y., & Mansour, I. (2021). *Political Connections , Government Ownership , and Earnings Management : Evidence from Jordan*. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2021.117575>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (16th ed.). Pearson.
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. P. (2000). *The separation of ownership and control in East Asian Corporations* (Vol. 58).
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(July), 183–199. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)

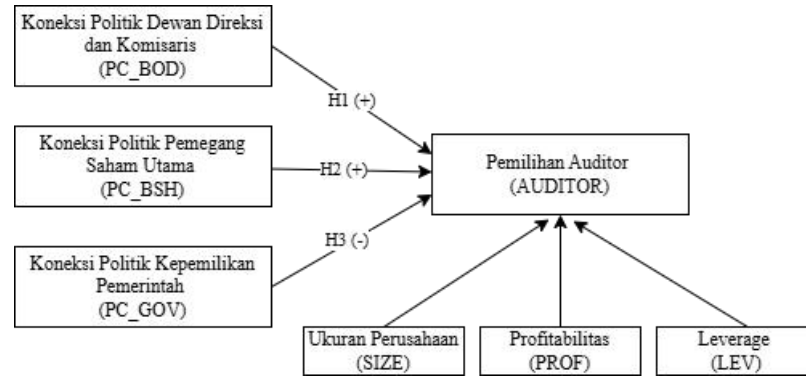
- DeFond, M., & Zhang, J. (2014). *A Review of Archival Auditing Research A Review of Archival Auditing Research*. August.
- Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Francis, J. R. (2011). *A Framework for Understanding and Researching Audit Quality*. 30(2), 125–152. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50006>
- Guedhami, O., Pittman, J. A., & Saffar, W. (2009). Auditor choice in privatized firms: Empirical evidence on the role of state and foreign owners. *Journal of Accounting and Economics*, 48(2–3), 151–171. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.08.003>
- Guedhami, O., Pittman, J. A., & Saffar, W. (2014). Auditor Choice in Politically Connected Firms *. *Journal of Accounting Research*, 52(1), 107–162. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12032>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Habib, A., Muhammad, A., & Jiang, H. (2017). Political connections, related party transactions, and auditor choice: Evidence from Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Harymawan, I. (2020). *Military reform , militarily-connected fi rms and auditor choice*. 35(6), 705–729. <https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2019-2258>
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied Logistic Regression* (3rd ed.). Wiley.
- Houston, J., Jiang, L., Lin, C., & Ma, Y. (2014). *Political Connections and the Cost of Bank Loans*. 52(1). <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12038>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Joceline, A., & Soepriyanto, G. (2023). *External Auditor Appointment in Indonesia State-Owned Enterprises : The Role Of Political Connections*. 10(1), 13–21. <https://doi.org/10.21512/jafa.v10i1.8904>
- Kalbuana, N., Suryati, A., & Pertiwi, C. P. A. (2022). Effect of Company Age, Audit Quality, Leverage and Profitability on Earnings Management. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 305–315. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4796>
- Kharis, J. B., & Nugrahanti, Y. W. (2022). *Board Diversity, Koneksi Politik dan Financial Distress*. 1987–2003.
- Knechel, W. R., Krishnan, G. V, Pevzner, M., Shefchik, L. B., & Velury, U. K. (2013). Audit Quality: Insights from the Academic Literature. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 32(April 2012), 385–421. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50350>
- Kompas.com. (2024). *Ramai politikus jadi komisaris BUMN, jabatan apa itu dan berapa gajinya?* Kompas.com – Ramai Politikus Jadi Komisaris BUMN
- Lutfiani, D., Kapuri, N., Amalia, Z., & Prawira, I. (2021). *Urgensi Financial Reporting Quality Sektor Publik dan Privat Selama Pandemi Covid-19*. 5(2), 163–180.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Tahunan OJK 2022*. PDF Laporan Tahunan OJK 2022
- Paramitha, M., & Setyadi, E. (2022). *Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kompleksitas Perusahaan Terhadap Fee Audit*. 3(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v3i1.12840>
- Preuss, S., & Konigsgruber, R. (2021). J . Account . Public Policy How do corporate political connections influence financial reporting? A synthesis of the literature. *Journal of*

- Accounting and Public Policy*, xxxx, 106802.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106802>
- Salehi, M. (2020). *The relationship between the companies' political connections and audit fees*. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0066>
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Pearson Canada Inc.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Politicians and Firms. *Quarterly Journal of Economics*, 109(4), 995–1025. <https://doi.org/10.2307/2118354>
- Sibuea, K., & Arfianti, R. (2021). *Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, dan Risiko Perusahaan terhadap Audit Fee*. 10(2), 126–140.
- Sudrajat, R. E., Susanti, S., & Uzliawati, L. (2023). *Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kualitas Audit*. 7(2), 269–280.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Tantawy, S., & Moussa, T. (2023). The effect of political connections on firms' auditor choice decisions and audit opinions: evidence from Egypt. *Asian Review of Accounting*, 31(3), 414–436. <https://doi.org/10.1108/ARA-07-2022-0161>
- Umdiana, N., & Siska. (2021). *Determinan Auditor Switching Secara Voluntary*. 10(1).
- Wahyuni, S., Handayani, E., Muhammadiyah, P., Java, C., & Java, C. (2022). *Earnings Management: An Analysis Of Corporate Strategy, Financial Performance and Audit Quality*. 12(8), 593–603. <https://doi.org/10.55493/5002.v12i8.4564>
- Wang, Q., Wong, T. J., & Xia, L. (2014). State ownership, the institutional environment, and auditor choice: Evidence from China. *Journal of Accounting and Economics*, 46(1), 112–134. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2008.04.001>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall.
- Wijaya, A. L. (2020). *Profitability, Audit Quality, and Firm Value: Case on Indonesian Manufacturing Companies*. 15, 43–61.
- Winarni, D., & Akbar, R. (2020). *Faktor Tekanan Institusional Dalam Mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi: Pendekatan Metoda Campuran*. 15, 1–11.
- Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7th ed.). Cengage Learning.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222–243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Distribusi Pemilihan Auditor Big Four dan Non-Big Four
Sumber: Data Penelitian (2026)



Gambar 2. Kerangka Penelitian

Tabel 1. Seleksi Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024	104
Perusahaan yang tidak menerbitkan annual report dan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2022–2024	(1)
Jumlah sampel akhir perusahaan	103
Total observasi penelitian (103 × 3 tahun)	309

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Referensi
Pemilihan Auditor	AUDITOR	Variabel dummy, bernilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big Four (PwC, EY, KPMG, atau Deloitte) atau KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan Big Four, dan 0 jika menggunakan KAP non-Big Four.	(Habib et al., 2017)
Koneksi Politik Dewan Direksi dan Komisaris	PC_BOD	Variabel dummy, bernilai 1 apabila salah satu anggota direksi atau komisaris perusahaan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah, anggota legislatif, militer, partai politik, atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan politisi, dan 0 jika tidak.	(Tantawy & Moussa, 2023)
Koneksi Politik Pemegang Saham Utama	PC_BSH	Variabel dummy, bernilai 1 apabila pemegang saham utama dengan kepemilikan minimal 10% saham memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah, anggota legislatif, militer, partai politik, atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan politisi, dan 0 jika tidak.	(Tantawy & Moussa, 2023)
Koneksi Politik Kepemilikan Pemerintah	PC_GOV	Variabel dummy, bernilai 1 apabila pemerintah memiliki minimal 20% saham perusahaan dan 0 jika kepemilikan pemerintah kurang dari 20%.	(Tantawy & Moussa, 2023)
Ukuran Perusahaan	SIZE	Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset perusahaan.	(Habib et al., 2017)
Profitabilitas	PROF	Profitabilitas perusahaan diukur menggunakan Return on Assets (ROA), yaitu laba bersih dibagi total aset perusahaan.	(Habib et al., 2017)
Leverage	LEV	Tingkat leverage diukur menggunakan rasio total liabilitas terhadap total aset perusahaan.	(Habib et al., 2017)

Tabel 3. Distribusi Frekuensi

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Auditor	Big Four	109	35,28
	Non-Big Four	200	64,72
PC_BOD	Ya	25	8,09

PC_BSH	Tidak	284	91,91
	Ya	9	2,91
PC_GOV	Tidak	300	97,09
	Ya	30	9,71
	Tidak	279	90,29

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
Size	309	29,824	2,475	21,910	35,430
Profitabilitas	309	0,002	0,075	-0,380	0,120
Leverage	309	0,580	0,319	0,000	1,940

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
PC_BOD	1,61	0,620
PC_BSH	1,22	0,821
PC_GOV	1,41	0,707
Size	1,75	0,572
Profitabilitas	1,23	0,814
Leverage	1,25	0,800
MEAN VIF	1,41	

Tabel 6. Hasil Kelayakan Model Regresi Logistik

Indikator	Nilai
Jumlah Observasi	309
Log Likelihood	-155,226
LR Chi-square	90,710
Prob > Chi-square	0,000
Pseudo R ²	0,226

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Coefficient (β)	Odds Ratio	z	p-value
H1	PC_BOD → Auditor	2,181	8,856	2,83	0,005**
H2	PC_BSH → Auditor	1,032	2,807	0,90	0,369
H3	PC_GOV → Auditor	-1,830	0,160	-2,44	0,015**
Kontrol	Size → Auditor	0,518	1,679	5,47	0,000**
Kontrol	Profitabilitas → Auditor	10,121	24.864,160	2,36	0,018**
Kontrol	Leverage → Auditor	-1,177	0,308	-1,80	0,072*

*Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Tabel 8. Hasil Robustness Test

Variabel	Coefficient	z	p-value
PC_BOD	1.334	3,11	0,002**
PC_BSH	0,625	0,96	0,339
PC_GOV	-1,103	-2,51	0,012**
Size	0,304	5,82	0,000**
Profitabilitas	6,385	2,71	0,007**
Leverage	-0,587	-1,77	0,077*

*Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **Signifikan pada $\alpha = 5\%$